

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat**

#### **1. Sejarah Perkembangan Kabupaten Lampung Barat**

Pembentukan Kabupaten Lampung Barat sudah dimulai sejak tahun 1967, saat diselenggarakannya Musyawarah Besar (Mubes) Pemuda Pelajar, mahasiswa dan masyarakat Lampung Barat se-Indonesia. Hasil dari Mubes inilah terbentuklah Panitia nasional dan Panitia Eksekutif. Mubes juga menghasilkan Sembilan resolusi. Menanggapi resolusi ini, DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Utara menyetujui dan memberikan dukungan moril serta meminta perhatian Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung Terhadap resolusi presidium musyawarah Nomor: 01/res/1967 yang menuntut ditingkatkannya eks Kewedanaan Krui menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat. Dukungan DPRD Kabupaten Lampung Utara tersebut tertuang dalam suratnya yang ditujukan Kepada Bupati Daerah Tingkat II Lampung Utara tertanggal 20 April 1967 dan ditandatangani oleh Ketua Dewan.

Tanggal 11 Juli 1967 DPRD Kabupaten Lampung Utara mengeluarkan Keputusan Nomor:30/II/DPRD/67 tentang Peningkatan Eks Kewedanaan menjadi Tingkat II Lampung Barat. Isi keputusan tersebut adalah menerima tuntutan masyarakat eks kewedanaan Krui menjadi tingkat II Lampung Barat. Perjuangan Keluarga Pelajar

dan Mahasiswa (KPM) dan masyarakat Lampung Barat tersebut menjadi dasar pertimbangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara dalam sumbang sarannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung mengenai calon ibukota eks Kewedanan Krui yang tertuang dalam suratnya Nomor PU.000/1232/Bank.LU/1978 tertanggal 27 September 1978. Sebelum resmi menjadi daerah yang definitif, Lampung Barat merupakan wilayah pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Liwa yang beribukota di Liwa. Hal ini berdasarkan Kepmendagri Nomor 114/1978 tentang Pembentukan Wilayah-wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kota Agung dan Wilayah Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Liwa dan Menggala. Tahun 1991 keluarlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat memiliki visi yaitu: “Lampung Barat Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa.” Visi Pembangunan tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sejahtera : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah.
- b. Berdaya Saing : Terwujudnya peningkatan kemampuan dan keunggulan daerah.
- c. Iman dan Taqwa : Terwujudnya masyarakat yang memiliki keshalehan hidup (taat kepada Tuhan dalam arti mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya) serta meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama.

Berdasarkan visi di atas, maka misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, harmonis, kesetaraan gender dan mengembangkan kebudayaan daerah.
- b. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian, kepariwisataan, inovasi teknologi, dengan fokus utama pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam serta energi baru dan terbarukan yang berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan iptek, kepemudaan serta kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan daya dukung infrastruktur, tata ruang dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan berkeadilan.

## **2. Geografis dan Topografi**

Luas wilayah lebih kurang 3.368,14 km<sup>2</sup> setelah pemekaran Kabupaten Pesisir Barat atau 10,6 % dari luas wilayah Provinsi Lampung. Lampung Barat terletak pada koordinat 4°47',16" - 5°56',42" lintang selatan dan 103°35',08" - 104°33',51" Bujur Timur. Berdasarkan curah hujan dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika, curah hujan Lampung Barat berkisar antara 2.500 – 3.000 milimeter setahun.

Secara topografi, Kabupaten Lampung Barat memiliki tiga bentuk topografi lahan, yaitu :

1. Topografi Dataran Rendah.

Daerah ini mempunyai ketinggian 0 - 600 meter dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, dan Pesisir Utara terletak pada daerah ini.

2. Topografi Perbukitan

Daerah ini mempunyai ketinggian 600 - 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah ini umumnya terdapat di kecamatan Balik Bukit dan Sumberjaya.

3. Topografi Pegunungan

Daerah ini mempunyai ketinggian 1.000 - 2.000 meter dari permukaan laut. Sebagian kecamatan Balik Bukit dan Sumberjaya, serta sebagian besar wilayah kecamatan Belalau terletak pada topografi daerah pegunungan ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 maka terbentuklah Kabupaten Lampung Barat, dengan batas wilayah administrasi Kabupaten:

- a. Sebelah Utara : Kab. Kaur (Provinsi Bengkulu),
- b. Sebelah Selatan : Samudera Hindia dan Teluk Semangka,
- c. Sebelah Barat : Samudera Hindia,
- d. Sebelah Timur : Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, dan Kab. Tanggamus.

Seiring dengan perjalanan waktu, Kabupaten Lampung Barat hingga saat ini telah memiliki penduduk sebanyak 393.818 jiwa (*www.lampungbaratkab.go.id diakses 8 Januari 2014 pukul 20.00*). dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani.

Seiring dengan dinamika pemerintah dan perkembangan masyarakat, maka pada tanggal 15 April 2010 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang pembentukan Kecamatan Kebun Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, Batu Ketulis, Bandar Negeri Suoh, Lumbok Seminung, Way Krui dan Krui Seatan, sehingga Kabupaten Lampung Barat sampai dengan saat ini memiliki 25 wilayah administrasi kecamatan. Setelah adanya pemekaran Daerah Otonomi Baru yaitu Pesisir Barat yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Barat maka kini wilayah Lampung Barat terdiri dari 15 kecamatan.

**Tabel. 3 Data Luasan Wilayah Kabupaten Lampung Barat**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Ibu Kota	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (Orang)	Kepadatan Penduduk (Orang/Km <sup>2</sup> )
1	Balik Bukit	175,63	Pasar Liwa	12	35.558	202,45
2	Bandar Negeri Suoh	170,85	Sri Mulyo	10	25.423	148,80
3	Batu Brak	261,60	Pekon Balak	11	12.827	49,04
4	Batu Ketulis	103,70	Bakhu	10	14.150	136,45
5	Belalau	217,93	Kenali	10	11.978	54,96
6	Sukau	223,10	Buay Nyerupa	10	20.371	91,30
7	Lumbok Seminung	22,40	Lumbok	11	6.721	300,04
8	Sekincau	118,28	Pampangan	5	17.566	148,51
9	Suoh	170,77	Sumber Agung	7	17.629	103,23
10	Pagar Dewa	110,19	Basungan	10	19.566	177,56
11	Sumber Jaya	195,38	Tugu Sari	6	22.784	116,61
12	Way Tenong	116,67	Mutar Alam	9	31.065	266,26
13	Gedung	87,14	Gedung	5	14.278	163,85

	Surian		Surian			
14	Kebun Tebu	14,58	Pura Jaya	10	18.881	1294,99
15	Air Hitam	76,23	Semarang Jaya	10	11.510	150,99

*Sumber : Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat, 2012.*

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain potensi sumberdaya alam, di Kabupaten Lampung Barat terdapat potensi lain yaitu di sektor perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan.

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Sumberjaya**

### **1. Sejarah Kecamatan Sumberjaya**

Kecamatan Sumberjaya resmi menjadi wilayah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. Kemudian setelah adanya pemekaran Kecamatan Kebun Tebu Mmelalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Kebun Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, Batu Ketulis, Bandar Negeri Suoh, Lumbok Seminung, Way Krui, Krui Selatan, maka batas Kecamatan Sumberjaya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Kebun Tebu
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Way Tenong
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara

Kecamatan Sumberjaya terletak pada koordinat: 05°00'33" Lintang Selatan dan 104°29'06" Bujur Timur, dengan 4°,47',16" - 5°,56',42" luas wilayah ± 195.38

km<sup>2</sup> atau 3.95 % dengan jumlah penduduk 22.784 jiwa dengan kepadatan 116,61 jiwa/km<sup>2</sup>, jarak ke Ibukota Kabupaten ± 78 km. Rata-rata jarak dari Kecamatan Sumberjaya ke Ibukota Kabupaten adalah ± 78 km. Sedangkan jarak antara Ibu kota Kecamatan dengan pekon-pekon yang ada di wilayah Kecamatan Sumberjaya relatif dekat, dimana jarak terjauh hanya sekitar 1 km. Secara topografi Kecamatan Sumberjaya merupakan daerah kerbukit-bukit ± 600-1000 M dari permukaan laut, yang terdiri dari lahan kering, persawahan, pertanian dan perkebunan dengan suhu rata-rata 20-25°C.

Iklm di Kecamatan Sumberjaya. Menurut Oldeman, Irsal L Darwis (1976), akibat pengaruh dari rantai pegunungan Bukit Barisan, maka Lampung Barat memiliki dua zone iklim yaitu:

1. Zone A (jumlah bulan basah > 9 bulan) terdapat dibagian barat Taman Bukit Barisan Selatan termasuk Krui dan bintuhan.
2. Zone B (jumlah bulan basah 11 bulan) terdapat dibagian timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Iklm Kecamatan Sumberjaya berada pada Zone B. Berdasarkan curah hujan dari Lembaga Meteorologi dan Giofisika, curah hujan Kecamatan Sumberjaya berkisar antara 2500-3000 milimeter setahun. Wilayah Kecamatan Sumberjaya sebagian besar adalah dipergunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan, sementara sisanya terbagi dalam berbagai peruntukan, seperti pemukiman penduduk, pariwisata, pedagang, perikanan, peternakan, fasilitas umum dan lain-lain. Gambaran peruntukan ini sekaligus menunjukkan bahwa karakteristik wilayah Kecamatan Sumberjaya merupakan wilayah pedesaan yang didominasi oleh kegiatan perekonomian dalam bentuk pertanian dan perkebunan.

## **2. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya**

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya terdiri dari:

- a) Camat
- b) Sekertaris Kecamatan terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan
  - 3) Sub Bagian Keuangan
- c) Seksi terdiri dari:
  - 1) Seksi Pemerintahan
  - 2) Seksi Kemasyarakatan
  - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan
  - 4) Seksi Ketemtraman dan Ketertiban
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya sudah dapat berjalan dengan cukup baik dengan fasilitas yang cukup memadai, baik dari aspek sarana dan prasarana maupun aspek Sumber Daya Manusia. Aparatur pemerintah Kecamatan Sumberjaya pada saat ini berjumlah 16 orang yang terdiri dari; Camat, Sekcam, Kasi Pemerintahan, Kasi Kemasyarakatan, Kasi Trantib, Kasi PMP, Kasubbag Keuangan dan Staf 9 orang.

Wilayah Kecamatan Sumberjaya secara administrasi terdiri dari 4 pekon dan 2 Kelurahan yaitu sebagai berikut:

1. Kelurahan Tugu Sari

2. Pekon Simpang Sari
3. Pekon Sukajaya
4. Pekon Sindang Pagar
5. Kelurahan Sukapura
6. Pekon Way Petai

### 3. Demografis Kecamatan Sumberjaya

Penduduk Kecamatan Sumberjaya berjumlah 23.411 jiwa yang terdiri dari 12.112 jiwa laki-laki dan 11.299 jiwa wanita yang menyebar di 4 pekan dan 2 kelurahan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata antara satu pekan dengan satu pekan lainnya dikarenakan pemukiman penduduk sebagian masih berpencar-pencar dan membentuk kelompok-kelompok kecil yang di sebut talang/umbul. Lebih lengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel. 4 Kepadatan Penduduk per Pekon Kecamatan Sumberjaya 2012**

No	Pekon	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Kel. Tugu Sari	36,45	5.640	155
2	Simpang Sari	18,90	3.650	193
3	Suka Jaya	26,48	2.854	108
4	Sindang Pagar	42,50	3.155	74
5	Sukapura	18,50	3.385	183
6	Way Petai	52,55	4.727	90
	Jumlah	195,38	23.411	120

*Sumber: Profil Kecamatan Sumberjaya 2012*

Rata-rata jumlah penduduk per kilometer persegi disebut dengan kepadatan penduduk. Hampir seluruh wilayah pekan yang ada di Kecamatan Sumberjaya belumlah padat dibandingkan dengan wilayah perkotaan, hal ini terlihat dari tabel di atas dimana tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Sumberjaya adalah 120 jiwa per kilometer persegi.

### **C. Gambaran Umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Barat**

Kedudukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat di bidang Kehutanan dan Perkebunan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat memiliki visi yaitu: "Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera", dengan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan bersama masyarakat.
- b. Mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan bersama masyarakat.
- c. Meningkatkan pemanfaatan hutan bersama masyarakat.
- d. Melaksanakan perencanaan kehutanan yang terarah dan terpadu.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan serta sarana dan prasarana kehutanan.

#### **1. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Kepala Dinas Kehutanan, Bagian Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Pada masing-masing Bidang membawahi seksi-seksi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-dinas, struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat (*Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-201*) :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Sekertariat, meliputi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perlindungan Hutan
  1. Seksi Pengawasan Pengamanan
  2. Seksi Penyelesaian Konflik
  3. Seksi Penyidikan
- d. Bidang Pengelolaan Hasil Hutan
  1. Seksi Kemitraan Usaha
  2. Seksi Bina Produksi Hasil Hutan
- e. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi
  1. Seksi Rehabilitasi Luar dan Dalam Kawasan Hutan
  2. Seksi Konservasi
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

**2. Tabel. 5 Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan Dinas Kehutanan  
Kabupaten Lampung Barat**

No	Nama	Pangkat	NIP	Alamat	Jabatan
<b>KEPALA DINAS</b>					
1	Ir. Amirian, M.P.	Pembina Tk.1 (IV/b)	19620128 198911 1 001	Liwa	Plt. Kepala Dinas
<b>POLHUT</b>					
2	Drs. Bambang Irawan	Penata Tk. 1 (III/d)	19670702 199803 1 010	Sukau	Kasat Polhut/ PPNS
3	Syafaruddin	Penata (III/c)	19641228 198603 1 008	Bengkunat	Polhut
4	Sri Edi Hastono	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	19601020 198303 1 013	Sumberjaya	Polhut
5	M. Lias	Penata Muda Tk.1 (III/b)	19600903 198603 1 010	Pesisir Selatan	Polhut
6	Zainal Abidin	Pengatur Tk.I (II/d)	19620712 198303 1 022	Suoh	Polhut
7	Buhroni Ibrahim	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	19681019 199803 1 003	Belalau	Polhut
8	Agusrizal	Penata Muda (III/a)	19730804 199803 1 007	Batubrak	Polhut
9	Anton Hindarto	Penata Muda (III/a)	19771202 199903 1 001	Lemong	Polhut
10	Isa Ansori	Penata Muda (III/a)	19770101 199903 1 002	Balik Bukit	Polhut
<b>TATA USAHA</b>					
11	Mizardiyanto, SE, MP	Penata Tk. I (III/d)	19720201 200003 1 009	Liwa	Kasubbag Keuangan
12	Ery Okviyanto, S.Ip	Penata Muda (III/a)	19791031 200003 1 001	Liwa	Staf Dinas Kehutanan
13	Wandi Nurlana, A.Md	Pengatur (II/c)	19680510 200701 2 017	Liwa	Staf Dinas Kehutanan
14	Peti Yulida	Pengatur Muda (II/a)	19740317 200902 2 002	Liwa	Staf Dinas Kehutanan

15	Iryansyah	Pengatur Muda (II/a)	19730504 200801 1 008	Liwa	Staf Dinas Kehutanan
16	Juliyah	Pengatur Muda (II/a)	19740714 200701 2 012	Liwa	Staf Dinas Kehutanan
<b>PERLINDUNGAN HUTAN</b>					
17	M. Henry Faisal, S.H, M.H	Pembina(IV/a)	19730912 199903 1 003	Liwa	Kabid Perlindungan Hutan /Koord. PPNS
18	Mirzon, S.H	Penata Tk. I (III/d)	19610815 198303 1 013	Liwa	Kasi Penyelesaian Konflik
19	Rizal Tias, S.E	Penata Tk. 1 (III/d)	19741207 199903 1 003	Liwa	Kasi Pengawasan dan Pengamanan Hutan
20	Yudhius Irza, S.Hut	Penata Muda (III/a)	19830729 100902 1 001	Liwa	Staf Bidang Perlindungan Hutan
21	Okta Yulian, SH	Penata Muda (III/a)	19861013 201101 1 002		Staf Bidang Perlindungan Hutan
22	Aprian Sucipto, SH	Penata Muda (III/a)	19850403 201101 1 002	Liwa	Staf Bidang Perlindungan Hutan
<b>Pengelolaan Hasil Hutan</b>					
23	Nana Sukmana Budiman, SE	Penata (III/c)	19600612 198602 1 006	Liwa	Kepala Bidang Pengelolaan Hasil Hutan
24	Unzir, S.P	Penata (III/c)	19730115 199903 1 006	Pesisir Tengah	Kasi Bina Produksi Hasil Hutan
25	Tedi Zadmiko, S.Km, M.M.	Penata (III/c)	19790424 199803 1 001	Pesisir Tengah	Kasi Kemitraan Usaha Hasil Hutan
26	Zohriyadi	Pengatur Tk.I (II/d)	19760705 199703 1 003	Liwa	Staf Bidang Pengelolaan

					Hasil Hutan
27	Harry Hermana	Penata muda (III/a)	19780420 200003 1 004	Liwa	Staf Bidang Pengelolaan Hasil Hutan
28	Nurtri Sarlina	Pengatur Muda (II/a)	19760916 200701 2 008	Liwa	Staf Bidang Pengelolaan Hasil Hutan
<b>U P T D</b>					
29	Azizul Yanuar, BBA	Penata (III/c)	19600113 198503 1 005	Sumberjaya	Ka. UPT PH Fajar Bulan
30	Fadli Munar, S.T	Penata Muda Tk.1 (III/b)	19750516 200604 1 021		Ka. UPT PH Sumber Jaya / Juru ukur
31	Zulpikardo, SP.	Penata (III/c)	19771006 200003 1 003	UPTD Krui	Ka. UPT PH Giham
32	Sapuan	Penata (III/c)	460014071	UPTD Bengkunt	Ka. UPT PH Pesisir Tengah
33	Ponijan, S.ST.	Penata Muda (III/a)	19690714 199803 1 005	UPTD Bakhu	Ka. UPT PH Bakhu.
34	Kifrawi, A.M	Penata (III/c)	19601025 198207 1 002		Ka. UPT PH Bengkunt
35	Ikhsan	Penata (III/c)	19630520 198403 1 008	Sekincau	Ka. UPT PH Pugung
36	Didik Hardiyanto, S.ST.	Penata Muda (III/a)	710028910	UPTD Giham	Staf Dinas Kehutanan
37	Yulius Usman	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	19690425 199003 1 005		Ka. UPT PH Sukau
<b>POLRES</b>					
38	Juherdi Sumandi	Brigadir Polisi (Brigpol)		Liwa	Kanit Polres Lampung Barat
39	Abdurrahman, S.H	Iptu		Liwa	Korwas PPNS/Polres Lampung Barat

40	Agus Gunawan	Brigadir Polisi Satu (Briptu)	Liwa	Anggota Polres Lampung Barat
41	Irawan Hartanto	Brigadir Polisi (Brigpol)	Liwa	Anggota Polres Lampung Barat
42	Tamrin	Brigadir Polisi (Brigpol)	Liwa	Anggota Polres Lampung Barat
43	Nizarudin	Brigadir Polisi Satu (Briptu)	Anggota Polres Lampung Barat	
<b>IPH</b>				
45	Suhaimi	Penata Muda (III/a)	19640709 198902 1 001	Pengukur Tata Batas UPTd IPH Provinsi Lampung
<b>SETDA</b>				
46	Nirlan, SH	Pembina Utama Muda (IV/c)		
47	Drs. Gison Sihite	Pembina Utama Muda (IV/c)	19610201 18903 1 004	Assisten Bidang Pemerintahan
48	Ir. Khairul Anwar	Pembina Utama Muda (IV/c)	19560412 197903 1 010	Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
49	Ir. Sudarto, MM	Pembina Tk. 1 (IV/b)	19641022 199203 1 002	Kepala bappeda Kab. Lambar
<b>TNBBS</b>				
50	Ir. John Kenedie, MM	Pembina Tk. 1 (IV/b)	19601020 199003 1 001	Kepala BB TNBBS
51	Hagnyo Wandono	Pengatur Muda Tk. 1		Staf TNBBS
<b>HONORER</b>				
52	Meri Evrina, SE	Staf Dinas Kehutanan Kab. Lampung Barat		
53	Tesa Repiyani	Staf Dinas Kehutanan Kab. Lampung Barat		

54	Cakra Aditama	Staf Dinas Kehutanan Kab. Lampung Barat
55	Ari Handara	Staf Dinas Kehutanan Kab. Lampung Barat
56	Meki Saputra	
57	Boge Ari Prabowo	
58	Jimi Gunta	
59	Ricky Hendra Saputra	
60	Adinda Selvia	
61	Pisna Juwita Sari	
62	Elva Widya Ningsih	
63	Indra Nugraha	
64	Okta Pirnandes	
65	Ahmad Saipullah	
66	Eva Yulia, A. Md.	
<b>KADER MASYARAKAT</b>		
67	E kosasih	Kader Pengamanan Hutan
68	Sukiman	Kader Pengamanan Hutan

*Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat, 2013*

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan. Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi, yaitu (*Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017*):

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kehutanan.
- e. Pelayanan administrasi.

#### **D. Kondisi Umum Hutan Kabupaten Lampung Barat**

Luas hutan di Kabupaten Lampung Barat sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/KPTS-II/2000 adalah 355.206,37 ha luas lahan kritis 239.568 ha, untuk luas lahan reboisasi dan luas lahan penghijauan adalah 8.280,00 ha. Sedangkan hasil hutan meliputi: kayu, madu, rotan, damar, bambu, dan gula enau. Setelah adanya pemekaran wilayah Pesisir Barat, maka luas hutan di Kabupaten Lampung Barat adalah 126.956,27 ha atau sebesar 61,47% dari luas wilayah administrasi Lampung Barat. Hutan tersebut terdiri dari:

**Tabel. 6 Pembagian Kawasan Hutan Kabupaten Lampung Barat**

No.	Jenis Hutan	Luas
1.	Kawasan Hutan Lindung	48.923,37 hektar
2.	Kawasan Hutan Produksi	48.923,37 hektar
3.	Kawasan Hutan Konservasi TNBBS	280.300 hektar

*Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat 2012*

**Tabel. 7 Pembagian luasan hutan di Kabupaten Lampung Barat**

No.	Nama Kawasan	Nomor Register	Luas Fungsi Hutan			
			Taman Nasional	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas
1	Kubu Niccik	22B				
2	Sekincau	46B	272.925	-	-	
3	Bukit Penetoh	47B				
4	Krui Barat	49B				
5	CAL Bukit Barisan Selatan	-	**14.156			
6	Gunung Seminung	9B	-	**420		
7	Bukit Serarukuh	17B	-	**1.596,10		
8	Krui Utara -	43B	-	**14.030		
9	Way Tenong Kenali	44B	-	**13.040	-	
10	Bukit Rigis	45B	-	**8.345	-	
11	Palakiah	48B	-	**1.800,17	-	
12	Kel. HL Pesisir	-	-	**9.360,50	-	
13	HL Pesisir (eks HPK)	-	-	**331,60	-	
14	Kel. HPT Pesisir	-	-	-	-	**33.358
Jumlah / Total			287.081	48.923.37	-	**33.358

Keterangan : \*) sudah ditata batas.

Sumber : Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012

Dilihat dari pembagian luasan hutan Kabupaten Lampung Barat, dapat kita lihat bahwa hutan di Kabupaten Lampung Barat cukup luas. Tapi luasnya hutan

berbanding terbalik dengan terbatasnya lahan di luar kawasan hutan negara untuk kebutuhan lahan budidaya pertanian yang menyebabkan sebagian masyarakat melakukan kegiatan perambahan liar di kawasan hutan negara atau di kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, maupun di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Akibat adanya perambahan liar tersebut, menyebabkan kondisi kawasan hutan negara di Kabupaten Lampung Barat saat ini cukup memprihatinkan, diperkirakan sekitar 241.148 hektar lahan kritis di dalam kawasan hutan negara. Berikut data kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Lampung Barat :

**Tabel. 8 Data Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Lampung Barat**

No	Nama Kawasan	Register	Luas (Ha)	Kondisi Hutan		Rehabilitasi	
				Berhutan (Ha)	Tidak Berhutan (Ha)	Sudah (Ha)	Belum (Ha)
1.	Gunung Seminung	9 B	420.00	394.13	25.87	-	-
2.	Bukit Sararukuh	17 B	1,596.10	-	1,586.10	150.00	1,436.10
3.	Krui Utara	43 B	14,030.00	3,401.91	10,628.09	1,900.00	8.728.09
4.	Way Tenong Kenali	44 B	13,040.00	3,265.70	9,774.30	2,250.00	7,524.30
5.	Bukit Rigus	45 B	8,345.00	1,824.88	6,520.12	3,100.00	3,420.12
6.	Palakiah	48 B	1,800.17	-	1,800,17	-	-
7.	HL Pesisir	-	9,360.50	2,811.73	6,548.77	-	-
8.	HL	-	331.60	331.60	-	-	-

	Bengkunat						
	Sub Total		48,923.37	12,029.95	36,893.42	-	-
9.	HPT Pesisir	-	33,358.00	7,041.79	26,316.21	-	-
	Total		82,281.37	19,071.74	63,209.00	7,400.00	21,108.61

*Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat 2012*

#### **E. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995 melalui penerbitan Kepmenhut No.622/Kpts-II/1995. Tindaklanjutnya, Dirjen Pemanfaatan Hutan, didukung oleh para LSM, universitas, dan lembaga internasional, merancang proyek-proyek uji-coba di berbagai tempat dalam pengelolaan konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Pada tahun 2007 adalah tahun pencanangan nasional Hutan Kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat, selain Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa.

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hutan Kemasyarakatan hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau ijin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin

Usaha Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. Hutan kemasyarakatan diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan.

Masyarakat yang melaksanakan kebijakan Hutan Kemasyarakatan bisa mematuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. Hutan Kemasyarakatan tidak hanya berkembang sebagai pelaksana program penyelamat hutan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran. Program Hutan Kemasyarakatan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kendala atau keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan adalah kesenjangan sumberdaya masyarakat, fasilitator dan pendanaan. Kendala-kendala dan keterbatasan akan selalu ada dalam setiap strategi pelaksanaan suatu program pembangunan, termasuk kebijakan Hutan Kemasyarakatan.

**Tabel. 9 Daftar Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung**

No	Lokasi	Nama KTH	Luas	No./Tgl SK Penetapan Area Kerja	No./Tgl SK IUPHKM
1	Kabupaten Tanggamus		2.547,22		
	Ds. Datarajan Kec. Ulu Belu	KPPM	593,58	SK.433/Menh ut-II/2007 10/12/2007	B.333/23/03/2007/12/2007
	Ds. Payung Kec. Kota Agung	Kop. Sumber Rejeki	499,56	Sda	B.334/23/03/2007 01/12/2007
	Ds. Datarajan Kec. Ulu Belu	Kop. Harapan Sentosa	300	Sda	B.335/23/03/2007 Des 2007
	Ds. Napal Kec. Bulok	Gapoktan HKm	475,71	SK.433/Menh ut-II/2007 10/12/2007	B.336/23/03/2007 01/12/2007
2	Kab. Lampung Utara		1.200,00		

	Ds. Suka Mulya Kec. Tanjung Raja	Kop. Karya Maju	1.200,00	SK.435/Menhut-II/2007 10 Desember'07	443/2007 10 Desember 07
3	Kab. Lampung Barat		1.970,72		
	Ds. Tribudisukur Kec. Sumber jaya	KTH. Bina Wana.	645	SK.434/Menhut-II/2007 10 Desember'07	B/1454/KPTS/III.Mei-07 13 Des 2007
	Ds. Simpang Kec. Sumber jaya	KTH Mitra Wana Lestari	260,76	Sda	B/1453/KPTS/III.Mei-07 13 Des 2007
	Ds. Gn. Terang Kec. Way Tenong	KTH. Rigis Jaya II	205,92	Sda	B/1452/KPTS/III.Mei-2007 13 Des 2007
	Ds. Sampang Sari Kec. Sumber jaya	KTH Setia Wanabakti	259,04	Sda	B/1451/KPTS/III.Mei-2007 13 Des 2007
	Ds. Lambak jaya Kec. Sumber jaya	KTH Rimba Jaya	600	Sda	B/1450/KPTS/III.Mei-2007 13 Des 2007
	Jumlah		5.717,94		

Sumber: [www.Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.go.id](http://www.Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.go.id) diakses 11 Januari 2014

pukul 16.00.